

Rabu, 12 Juli 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Komisi III Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah
Nama Media	Sumut Pos
Newstrend	DPRD Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah
Halaman/URL	9 dan 12
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Negative



RDP: Komisi III saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Asuransi Prudential Life Insurance di gedung DPRD Kota Medan, Senin (10/7).

Komisi III Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah

KOMISI III DPRD Medan meminta pihak PT Asuransi Prudential Life Insurance untuk segera mencairkan klaim asuransi tertanggung yang telah meninggal dunia. Sebab, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak asuransi.

► Baca Selengkapnya ... Hal 12

Komisi III Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah

Sambutan dari Halaman 9

Hal ini dikarenakan Komisi III saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Asuransi Prudential Life Insurance di gedung DPRD Kota Medan, Senin (10/7).

Tangen dibarengi dengan yang tidak masuk akal. Kalau sudah diberikan polis, berarti klaim nasabah sudah memenuhi syarat. Jangan setelah nasabah meninggal lalu disebut ada persyaratan yang tidak masuk akal. Apalagi ini asuransi, bukan investasi.

Pantauan awak media, RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III Sibar Tarigan dan turut diikuti Anggota Komisi seperti Erwin Sahian dan Irwanjati Siregar. Turut hadir pihak PT Prudential Life Insurance, Paulina LT bernama Sheri Kangila dan Aris AP.

Sementara mewakili pihak Orisan Insurances Kenangan (ORI), dihadiri M Fajar S. Kurniawan, RDP juga turut dihadiri Para Juru Na Maret Laila Skep CWCEA, CLAP, didampingi Agus Ihsan SH dan Muhammad Ridha SH.

Sama halnya dengan Dain, Anggota Komisi III Erwin Sahian juga mendesak agar pihak Prudential untuk segera mencairkan klaim. "Syarat dan kewajiban sudah dipenuhi ahli waris sesuai ketentuan. Segera bayar, kalau tidak bisa, tegaskan Erwin Sahian yang merupakan politisi PSI itu.

Sementara itu, menurut Kasas Budim Na Maret Laila, pihaknya menagih pihak PT Asuransi Prudential Life Insurance karena tidak membayar kewajiban, yakni asuransi kematian tertanggung. Nasabah yang meninggal dunia adalah waris Yustinus dan tertanggung Marinda ahli waris Salsal Hani Kurni. Dipastikan lagi, nasabah Tawati Laila merupakan tertanggung polis (1000000), yang diterbitkan 14 Mei 2019 dengan premi per bulan Rp 300 ribu. Beresakutan meninggal pada 5 Agustus 2020 dan sudah membayar premi sebanyak 19 kali.

Namun karena Na Maret Laila, hingga saat ini klaim asuransi belum diberikan pihak PT Prudential dengan alasan yang tidak masuk akal. Menurut Maret, dipikirkan klaim untuk Tawati Laila sebesar Rp 100 juta, untuk Salsal Hani Hani sebesar Rp 1,7 miliar dan untuk Maret sebesar Rp 1,7 miliar.

Sementara itu, pihak PT Asuransi Prudential Life Insurance Paulina diwakili Sheri Kangila saat RDP menyatakan, adapun alasan pihaknya tidak mencairkan klaim tertanggung nasabah atas nama Tawati Laila adalah karena akan melakukan pemeriksaan berkas kesehatan, yakni hasil pemeriksaan laboratorium HBA VC, urine dan lain-lain.

Sementara menurut Maret sebuah klaim budim, hal itu merupakan akibat dari pihak Prudential. "Saya itu sebelum diberikan polis, ini kan polis sudah keluar, tentu syarat kesehatan sudah terpenuhi," pungkas Maret.

(smp/awr)

Judul	Komisi III DPRD Medan Rekomendasi Asuransi Prudential Bayar Premi Nasabahnya
Nama Media	Sinar Indonesia Baru
Newstrend	DPRD Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

Komisi III DPRD Medan Rekomendasi Asuransi Prudential Bayar Premi Nasabahnya

Medan (SIB)

Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan klaim asuransi yang harus dibayarkan PT Prudential Life cabang Medan, Jalan Putri Hijau No.10, kepada 3 orang pemegang polis. Mereka atas nama Sabahati Hulu ahli waris Yustina Buulolo, Marani ahli waris Sujud Hati Faana dan Tansi Laia ahli waris Sabar Hati Talunohi di ruang Komisi III gedung dewan, Senin (10/7).

RDP dipimpin Ishaq Abrar Mustafa Tarigan S.I.P dari P Demokrat mengatakan, setiap masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. "Kami berharap, itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Sebab, kita juga menghadirkan pihak OJK," ucapnya.

Paulina LT, Hand Of Major Klaim Prudential Indonesia menekankan, bahwa ada 3 klaim yang diusulkan. "Tapi kami melihat hanya satu klaim yang bisa diproses. Itupun ada beberapa berkas yang harus dilengkapi pihak nasabah. Makanya, klaim asuransi belum bisa dibayarkan. Itu merupakan mekanisme dari pihak perusahaan, untuk proses pembayaran klaim asuransi para nasabah," ucapnya menerangkan.

MF Sagala perwakilan dari OJK Regional 5 Medan mengatakan, ada beberapa mekanisme pengaduan sengketa dan konsumen yang harus diselesaikan. "Kami merupakan lembaga penerima pengaduan masyarakat, menyangkut semua pendanaan yang ada," ujarnya.

Dalam konteks klaim asuransi ini, kata dia, seluruh perjanjian tertuang dalam Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ).

"Artinya bisnis Asuransi ini bisnis penuh resiko. Sejak ditandatangani surat polis, selama 14 hari kerja peserta polis dapat membatalkan perjanjian apabila ada hal yang diragukan. Setelah itu, barulah polis tersebut efektif berlaku," jelasnya.

Sementara itu, NS Merati Laia dari kantor hukum M Ardiansyah Hasibuan SH MH dan rekan, selaku kuasa hukum ke 3 nasabah Prudential tersebut menjabarkan kembali, bahwa Tansi Laia pemegang polis 12896021 diterbitkan 14 Mei 2019 dengan premi 500 ribu per bulan.

"Pada 5 Agustus 2020 dia meninggal dan sudah 19 kali membayar preminya. Pihak ahli waris, melalui kuasa hukum sudah melengkapi berkas yang diminta. Tapi kenapa pihak asuransi terkesan menolak membayar preminya," tuturnya.

Anggota Komisi III lainnya, Irwansyah SAG dari FPKS melihat persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya, harus ada itikad baik dari pihak Prudential. "Untuk itu, saya berharap ada win-win solution setelah RDP ini," harapnya.

Menanggapi usulan Irwansyah tersebut, Isaq Abrar selaku pimpinan sidang setuju atas sarannya. "Karena alasan dilaksanakannya RDP hari ini, untuk mencari solusi terbaik bagi pihak Prudential maupun pemegang polis yang saat ini bersengketa," imbuhnya.

Sedangkan Hendri Duin berpendapat, apabila di Tahun 2019 sitertanggung telah menandatangani kontrak asuransi, maka pihak Prudential harus membayarkan preminya apabila dia meninggal dunia.

Hadir dalam RDP tersebut anggota Komisi III lainnya, yaitu Irwansyah S. Ag (PKS), M Rizki Nugraha (Golkar), Hendri Duin (PDI-P) dan Erwin Siahaan (PSI). (A&C)

Judul	Imbal Hasil Unitlink Kian Unjuk Gigi
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kinerja Unitlink
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

Imbal Hasil Unitlink Kian Unjuk Gigi

Imbal hasil unitlik mengalahkan banyak produk investasi

Arif Ferdianto

JAKARTA. Penjualan produk unitlink di dalam negeri memang tengah menurun. Kendati begitu, produk asuransi berbalut investasi ini mampu mencatatkan imbal hasil yang menggiurkan. Bahkan, imbal hasilnya mampu mengalahkan imbal hasil sejumlah produk investasi konvensional.

Berdasarkan data Infovesta Utama, bila dihitung sejak awal tahun hingga Juni 2023, hanya instrumen reksadana pendapatan tetap yang bisa mencetak kinerja rata-rata lebih baik dari unitlink. Kinerja reksadana saham justru minus di periode tersebut.

Unitlink yang mencatat kinerja rata-rata paling mentereng adalah unitlink saham. Sepanjang 2023 berjalan hingga Juni, unitlink saham tercatat memberi imbal hasil rata-rata 3,37% (*lihat tabel*).

Imbal hasil unitlink saham memang naik tajam. Di Mei lalu, imbal hasil rata-rata unitlink saham hanya sebesar 1,47% sejak awal tahun.

Chief Financial Officer PT BNI Life Insurance Eben Eser Nainggolan menyebut, di antara

produknya, memang kinerja unitlink saham paling menonjol di sepanjang semester pertama tahun ini. "Imbal hasil tertinggi dicatatkan oleh Blife Link Saham Aktif sebesar 6,18% sejak awal tahun," ujarnya, Selasa (11/7).

Pendapatan tetap

Eben mengungkapkan, imbal hasil produk Blife Link Saham Aktif tinggi berkat pemilihan sektor yang tepat. Selain itu, pengelola dana aktif melakukan *trading* untuk mendorong imbal hasil.

Kendati begitu, Eben menilai unitlink saham cuma akan menjadi jawara sementara.

"Melihat masih tingginya volatilitas pada pasar saham, kami melihat instrumen yang akan lebih unggul adalah jenis pendapatan tetap," kata dia.

Eben menyebut, produk unitlink pendapatan tetap BNI Life juga memberi cuan optimal. Hingga Juni 2023, imbal hasil pada Blife Link Pendapatan Tetap Cemerlang mencapai 5,6% sejak awal tahun.

Apalagi, prospek pergerakan *yield* obligasi masih positif. "Kami memproyeksikan masih ada potensi penurunan *yield* sampai dengan akhir tahun yang akan membuat harga obligasi kembali meningkat," tandas Eben.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisor Fajar Dwi Alfian punya pendapat serupa. Dia menilai, unitlink berbasis pendapatan tetap berpotensi memberi imbal hasil optimal.

Ini didorong sentimen melandainya tingkat inflasi domestik dan global, serta perlambatan ekonomi global. "Volatilitas di aset pendapatan tetap masih dibayangi ketidakpastian terkait arah suku bunga The Fed dan data ekonomi di AS yang memaksa bank sentral terus *hawkish*," ujar Fajar. ■

Kinerja Unitlink vs Instrumen Investasi Lain (Juni 2023)

Produk	1 Bulan	YtD
Unitlink Saham	1,78%	3,27%
Unitlink Campuran	1,01%	2,29%
Unitlink Pendapatan Tetap	0,59%	3,26%
Unitlink Pasar Uang	0,39%	1,40%
IHSG	-0,38%	-2,76%
LQ45	0,37%	0,91%
Indeks Obligasi Negara	0,44%	3,50%
Indeks Obligasi Korporasi	0,38%	1,91%
Reksadana Saham	-0,82%	-1,92%
Reksadana Campuran	0,33%	0,88%
Reksadana Pendapatan Tetap	0,94%	3,63%

Sumber: Infovesta Utama

Judul	Komisioner Baru dan Tantangan OJK
Nama Media	Kompas
Newstrend	Kejagung Sita Aset Tanah, Saham dan Uang dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat
Halaman/URL	6
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

Komisioner Baru dan Tantangan OJK



omisi IX DPR akhirnya memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai anggota baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (*Kompas*, 10/7/2022).

Mereka mengisi dua posisi yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK). Dengan tambahan dua komisioner ini, berarti kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 11 komisioner.

Keduanya terpilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, dari empat calon yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR. Dua komisioner baru yang terpilih ini langsung dihadapkan pada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah berat, terutama di sektor jasa keuangan digital.

Hal ini sejalan dengan peran OJK yang juga kian strategis di era UU P2SK sehingga tersemat istilah "supremasi baru OJK". Seperti kita tahu, dengan adanya UU P2SK, terdapat pula penambahan fungsi-fungsi baru di OJK.

Termasuk di dalamnya pengawasan untuk industri yang relatif baru, seperti tekfin, dan aktivitas transaksi aset keuangan digital, seperti kripto. Ini penting agar kehadiran dan perkembangan industri tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak memunculkan risiko-risiko baru bagi perekonomian.

Selain itu, ada amanat baru terkait perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi, serta implementasi bursa karbon. Dua komisioner baru ini tampaknya akan lebih banyak berurusan dengan sektor jasa keuangan digital.

Sangat pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital harus diakui sering membuat otoritas, termasuk OJK, gagap.

Selama ini masih banyak sorotan tentang lemahnya OJK dalam menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga perlindungan konsumen sehingga muncul berbagai kasus yang merugikan investor serta mengancam stabilitas sektor keuangan dan bisa berdampak sistemik pada perekonomian itu sendiri.

Munculnya kasus-kasus di perusahaan keuangan, seperti Jiwasraya, AJB Bumiputera, Bank Muamalat, Arjuna Finance, dan SNP Finance, antara lain juga karena lemahnya pengawasan OJK, sebab beberapa di antaranya sebenarnya masalahnya sudah diketahui sejak OJK beroperasi pada awal 2013.

Belum lagi maraknya kasus investasi bodong berkedok jual beli aset kripto dan *non-fungible token* (NFT), serta menjamurnya pinjaman daring yang sudah memakan banyak korban. Tingginya kredit macet di tekfin pinjaman antarpihak (*peer to peer/P2P lending*) yang terjadi selama ini juga bisa mengancam kredibilitas industri ini.

Di sisi industri pembiayaan, problem yang diungkapkan pengamat, antara lain, sulitnya permodalan perusahaan pembiayaan. Karena itu, perusahaan dijual kepada investor asing dan dominasi asing yang terlalu kuat berpotensi menciptakan risiko keuangan yang lebih besar bagi perekonomian.

Tambahan tugas baru OJK dan berbagai kritik terhadap OJK selama ini juga menyoroti pentingnya memperkuat kualitas SDM dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk BI, Bappebti, Kepolisian Negara RI, dan kementerian.

Judul	Mau Ekspansi, IFG Life Bakal Akuisisi atau Merger
Nama Media	Kontan
Newstrend	IFG Life Rilis IFG LifeSAVER
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

Konter

Mau Ekspansi, IFG Life Bakal Akuisisi atau Merger

JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG Life) memasukkan rencana akuisisi dan merger sebagai bagian dari strategi membesarkan bisnisnya. *Head of Corporate Secretary* IFG Life Gatot Haryadi menyatakan, dalam rangka meningkatkan kapabilitas usaha dan perluasan bisnis, strategi pengembangan bisnis secara anorganik melalui akuisisi memang menjadi salah satu opsi.

Perusahaan ini terus mengkaji peluang yang ada. "Diperlukan kajian yang komprehensif dalam menentukan target entitas potensial yang akan diakuisisi. Saat ini IFG Life bersama pemegang saham masih pada tahapan diskusi dan pembahasan terkait hal ini," ujar Gatot, kemarin.

Gatot menjelaskan, merger atau akuisisi menjadi salah satu opsi dalam strategi pengembangan bisnis. Namun dalam implementasinya, diperlukan kajian dan analisis yang komprehensif, antara lain aspek bisnis, keuangan, hukum, teknologi informasi, operasional dan *human capital*. "Sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dalam pertimbangan pengambilan keputusan strategi," jelasnya.

Arif Ferdianto

Judul	OJK Gencarkan Program Literasi Keuangan
Nama Media	Pikiran Rakyat
Newstrend	Program literasi dan inklusi keuangan OJK
Halaman/URL	7
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

OJK Gencarkan Program Literasi Keuangan

JAKARTA, (PR).-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan secara masif untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan.

Hingga 30 Juni 2023, OJK telah melaksanakan 1.010 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 284.680 orang peserta secara nasional.

"Selain itu, lewat Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), telah dimanfaatkan sebanyak 21.147 pengguna dengan 22.451 akses modul dan 17.213 Sertifikat Kelulusan Modul," kata OJK dalam siaran pers yang dikutip kontributor "PR" **Satrio Widi-anto** di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Seperti diketahui, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak tahun 2018 hingga 2022 mencapai Rp 126 triliun. Menurut OJK, jumlah itu kemungkinan lebih besar lagi, karena masih ada juga korban yang tidak melaporkan atau merupakan *silent victim*.

"Penyebab maraknya investasi ilegal di Indonesia yakni bagi pelaku, kemudah-



*SISWA mengikuti edukasi literasi keuangan di SDN 078 Sindang Sari, Antapani Wetan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.**

an membuat aplikasi, web, dan penawaran melalui media sosial, serta banyak *server* di luar negeri. Sementara di kalangan masyarakat, karena mudah tergiur bunga tinggi dan belum paham investasi," kata Deputy Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito.

Di sisi lain, OJK juga telah menelurkan sejumlah kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan terhadap konsumen. Pertama, dengan menginisiasi Kick Off Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Kampuang Nagari Sumpu dan Nagari Taram, Provinsi Sumatra Barat.

"Ke depan, GM EKI akan direplikasi di berbagai wilayah perdesaan di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan desa secara terpadu guna mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta me-

ningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan," katanya.

Kedua, memperluas implementasi Program Desaku Cakap Keuangan, untuk percepatan dan pemerataan literasi keuangan di seluruh wilayah Indonesia melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Ketiga, memperluas jejaring aliansi strategis dengan berbagai kementerian/lembaga dan mitra strategis seperti platform media sosial untuk memperkuat efektivitas program kerja strategis terkait edukasi, literasi, dan perlindungan konsumen.

Keempat, mendukung penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk menunjang terwujudnya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM.

"Terkait dengan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), OJK terus memantau penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian," kata Sarjito.***

Judul	OJK Terus Pantau Penyelesaian Kewajiban Kresna Life terhadap Pemegang Polis
Nama Media	Bali Tribune
Newstrend	PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life)
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

OJK Terus Pantau Penyelesaian Kewajiban Kresna Life terhadap Pemegang Polis

Jakarta, Bali Tribune

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitoring penyelesaian masalah di industri asuransi, termasuk terkait dengan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). "OJK terus memantau penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian," tulis OJK dalam Laporan OJK Dorong Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan Secara Masif pada Selasa (11/7) seperti dilansir Bisnis.com.



Ogi Prastomiyono

Pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Kresna Life lantaran perusahaan asuransi jiwa itu sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus risk-based capital (RBC)

tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, Kresna Life juga tidak mampu menutup defisit keuangan, yaitu selisih kewaj

iban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. "Dengan dicabutnya izin usaha Kresna Life, maka Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyatakan bahwa upaya perlindungan konsumen juga dilakukan oleh OJK dengan beberapa kali melakukan fasilitasi pengaduan konsumen, yaitu mempertemukan pemegang polis dengan Kresna Life untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan konsumen.

Selain itu, OJK juga telah memberikan edukasi di beberapa kota kepada pemegang polis mengenai SOL, beserta akibat hukum atas konversi klaim asuransi menjadi pinjaman subordinasi. "Tindakan pengawasan dilakukan oleh OJK, termasuk pencabutan izin usaha Kresna Life dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," tandasnya. **net**

Judul	Merekonstruksi Koperasi
Nama Media	Suara Merdeka
Newstrend	Kejagung Sita Aset Tanah, Saham dan Uang dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

Merekonstruksi Koperasi

Oleh Purwoko



ADA kesalahan fatal dari pemerintah dalam melakukan penilaian terhadap koperasi, setelah koperasi digambarkan seolah sudah hancur berkeping-keping akibat tsunami dahyat oleh kebobrokan pengelolaan beberapa koperasi besar yang sebagian berasal triliunan rupiah. Sebut saja Koperasi Jiwastaya, Koperasi Sejahtera Bersama, Koperasi Intidana, Koperasi Langit Biru, Koperasi Lima Garuda, dan lain-lain.

Beberapa koperasi tersebut selain menghancurkan kepercayaan masyarakat berkoperasi juga mengubah wajah koperasi seolah setan jahannam yang sangat menakutkan, sampai-sampai masyarakat mendekat saja tidak berani. Porak porandanya nama besar koperasi sebagai pahlawan ekonomi harus segera dibangun kembali atau direkonstruksi agar koperasi kembali menjadi garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Sebenarnya di sisi lain, masih ada ribuan koperasi yang tangguh dan benar-benar dapat menjadi pemain pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi mikro dan kecil yang sangat piawai. Namun saat ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) justru sibuk membuat peraturan yang sebenarnya peraturan-peraturan tersebut menyulitkan dan tidak dibutuhkan koperasi. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Pengembangan dan Penyelesaian Sistem Keuangan) yang di dalamnya ada aturan-aturan yang membelenggu gerak langkah koperasi, dan Kemenkop-UKM justru sibuk membuat peraturan yang sebenarnya peraturan-peraturan tersebut menyulitkan dan tidak dibutuhkan koperasi. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Pengembangan dan Penyelesaian Sistem Keuangan) yang di dalamnya ada aturan-aturan yang membelenggu gerak langkah koperasi, dan Kemenkop-UKM justru sibuk membuat peraturan yang sebenarnya peraturan-peraturan tersebut menyulitkan dan tidak dibutuhkan koperasi.

Bahkan seolah ada kekuatan mega dahsyat yang saat ini menginginkan koperasi di Indonesia

harus menjadi kerdil, koperasi tidak boleh besar, koperasi harus menutur aturan lembaga usaha lainnya. Padahal koperasi itu lembaga usaha khusus karena dimiliki, dijalankan dan dimanfaatkan untuk anggota. Itu sangat berbeda dari lembaga usaha lainnya yang bersifat korporasi. Namun yang terjadi justru Kemenkop-UKM malah tidak mendukung upaya-upaya insan gerakan koperasi untuk membangun kembali citra koperasi. Justru pemerintah sibuk membuat aturan-aturan yang *out of the box* dari prinsip dan jati diri koperasi. Yang lebih mengerenkan lagi seolah pemerintah *kebelet* untuk segera membatasi gerak langkah koperasi agar koperasi tidak tumbuh subur di Indonesia.

Untuk merekonstruksi koperasi Indonesia, dibutuhkan arsitek dan tenaga ahli yang kompeten di bidang koperasi, bukan dirancang sketsa dan desainnya oleh orang yang tidak paham tentang koperasi, bahkan tidak pernah terjun di koperasi alias orang yang hanya memiliki ilmu laduni koperasi, bukan ilmu dan pengalaman berkoperasi. Setiap kantor pemerintah yang berlabel koperasi harus diisi oleh orang-orang yang mengerti koperasi agar kebijakan yang diambil memberikan angin segar bagi tumbuhkembangnya koperasi, bukan justru malah memberatkan bahkan mengerdikan koperasi.

Kompetensi Koperasi

Sudah saatnya pembangunan koperasi Indonesia dikomandani oleh orang yang benar-benar berpengalaman berkoperasi, bukan hanya orang yang berilmu tentang koperasi dari membaca teori dan jurnal-jurnal ilmiah belaka, serta orang yang berjiwa koperasi bukan hanya jomawa seolah ahli koperasi. Konstruksi bangunan koperasi jika tidak diarsitekturi oleh petarung-petarung koperasi akan sangat gampang disusupi bahan-bahan bangunan yang tidak berkualitas, bahkan bahan-bahan bangunan yang mengorbankan tiang penyangga koperasi. Inilah yang harus diwaspadai.

Sering terjadi kejadian-kejadian aneh saat ada petugas atau pegawai dari kementerian atau dinas koperasi yang akan menilai atau mengawasi koperasi malah berguru pada pegawai koperasi (pengurus, pengawas, dan pengelola). Kentara sekali draf item yang berupa kalimat pernyataannya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di koperasi, tetapi bahasa korporasi. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan, jika perlu dimagangkan di koperasi dulu.

Material konstruksi pembangunan koperasi harus dijauhkan dari kotoran-kotoran yang dapat menjadi pelemah koperasi. Pemikiran-pemikiran yang ingin menjatuhkan koperasi dengan aturan lembaga usaha lainnya dan tidak cocok dengan jati diri koperasi harus dimusnahkan, karena sangat jelas terbaca

Sudah saatnya pembangunan koperasi Indonesia dikomandani oleh orang yang benar-benar berpengalaman berkoperasi, bukan hanya orang yang berilmu tentang koperasi dari membaca teori dan jurnal-jurnal ilmiah belaka.

adanya penyusup-penyusup yang sengaja dipasang untuk melemahkan, bahkan menghancurkan koperasi. Seperti saat pembahasan UU P2SK, dan sampai saat ini pun belum bersih betul di UU tersebut dari kotoran-kotoran yang mengerdikan koperasi. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang justru dibuat sendiri oleh Kemenkop-UKM yang harusnya menjadi katalisator tumbuhkembangnya koperasi, seperti adanya moratorium dan Pememenkop Nomor 8/2023.

Kebijakan moratorium koperasi mengindikasikan seolah koperasi tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan terkesan eksistensi koperasi telah runtuh berkeping-keping. Jikalau ada yang masih berjalan pun dianggap dalam kondisi yang harus diwaspadai. Dampak psikologis dari permasalahan yang dihadapi beberapa koperasi telah memburamkan wajah koperasi Indonesia, karena memang dana atau uang yang dipermasalahkan mencapai triliunan rupiah. Angka yang spektakuler dan terbaca aneh jika koperasi-koperasi dengan aset dan jumlah simpanan anggota bertiliun rupiah, tetapi Kemenkop-UKM yang statusnya sebagai pembina dan pengawas koperasi tidak mengendus adanya ketidakberesan pada koperasi tersebut. Yang terlihat justru bersibukria mengadang terbentuknya kantor cabang KSP maupun pendirian KSP dengan moratorium. Sungguh aneh dan lebih lucu dari *stand up comedy*-nya Cak Lontong.

Merekonstruksi koperasi Indonesia, selain sumber daya manusia (SDM) yang perlu disiapkan sesuai dengan kebutuhan untuk menumbuhkembangkan koperasi, juga dibutuhkan perlindungan terhadap koperasi dari ancaman-ancaman pembunuhan koperasi. Indikasinya di dalam penyusunan peraturan-per-

aturan terkait koperasi, gerakan koperasi tidak dilibatkan secara serius, justru tim penyusunnya didominasi oleh akademisi yang hanya berkiblat pada teori yang tidak pas jika diterapkan di koperasi, namun oleh tim penyusun seolah itulah yang benar. Akhirnya saat diterapkan tidak bisa dijalankan, kalau dijalankan dengan cara pemaksaan yang berakibat hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan beberapa pasal isinya seolah titipan pemilik modal besar yang iri terhadap keberhasilan bisnis koperasi, hingga mereka ingin menaploki koperasi. Jika hal ini diberi peluang dengan iming-iming akan membawa banyak modal, maka upaya merekonstruksi koperasi akan terhambat.

Koperasi harus lebih mengutamakan kekuatan modal sendiri dengan melibatkan anggota secara maksimal agar terhindar dari ancaman pemilik modal besar yang akan menguasai koperasi. Penggunaan data anggota koperasi itu sangat penting, agar koperasi dapat menempatkan anggota sebagai pemilik koperasi, anggota sebagai pengelola dan anggota sebagai penerima manfaat dari usaha koperasi. Memperlakukan anggota dengan bijaksana akan menjadi tiang penyangga bangunan koperasi yang sangat kuat. Karena itu dibutuhkan keterbukaan dalam melaporkan kinerja usaha koperasi kepada anggota, agar anggota benar-benar terpuaskan dengan koperasi dan tidak dimanfaatkan oleh para cukong-cukong yang menganas.

Pemerintah harus meyakini bahwa koperasi dapat menjadi lembaga usaha yang profesional, seperti yang pernah ditunjukkan pada 1998 saat krisis moneter dan 2008 juga saat krisis moneter. Di saat ekonomi nasional sedang kacau bahkan hampir ambruk, koperasi tampil sebagai pahlawan penyelamat ekonomi nasional. Karena itu dalam rangka merekonstruksi koperasi Indonesia yang sedang distempel bermasalah, maka pemerintah harus melibatkan secara maksimal gerakan-gerakan koperasi yang tidak terafiliasi partai politik tertentu.

Dengan melibatkan gerakan koperasi diharapkan rekonstruksi koperasi tidak salah arah, sesuai prinsip dan jati diri koperasi, serta sebagai pengawas dan pembina koperasi pemerintah harus menempatkan orang-orang yang kompeten di bidang koperasi untuk menduduki jabatan di Kemenkop-UKM hingga dinas koperasi. (46)

— Dr Purwoko MM, dosen Magister Manajemen FEB UAD Yogyakarta, pengurus Forum Koperasi Indonesia (Forkopi).

Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

Judul	Satu Universitas Nyaris Terpedaya
Nama Media	Banjarmasin Post
Newstrend	OJK Regional 9 Kalimantan
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Negative

PAPARAN -
Kepala Kantor
OJK Regional
9 Kalimantan,
Darmansyah
(kiri), sampaikan
paparan pada
media update di
Surabaya, Kamis
(6/7) lalu.



BPOST GROUP/M DANU SAPUTRA

Satu Universitas Nyaris Terpedaya

■ OJK Regional 9 Kalimantan Endus Jasa Keuangan dan Travel Ilegal

BANJARMASIN, BPOST - Sebagai langkah preventif mencegah kerugian masyarakat dan meningkatkan indeks literasi serta inklusi masyarakat di Kalimantan Selatan, OJK Regional 9 Kalimantan, terus melakukan beragam edukasi ke berbagai wilayah.

Sejak Januari hingga Mei 2023, telah dilaksanakan kegiatan edukasi, dengan peserta sesuai sasaran prioritas OJK yaitu pelaku UMKM, masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), penyandang disabilitas serta pelajar/santri. Sejauh ini telah menjangkau 2.026 orang.

Kepala Kantor OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah, menyebut, hingga 31 Mei 2023, pihaknya telah menerima 29 pengaduan dari masyarakat.

"Rinciannya, 14 pengaduan di sektor perbankan dan 15 pengaduan berkaitan sektor Industri Keuangan Non-Bank

STORY HIGHLIGHTS

- Sejak Januari hingga Mei 2023, Kantor OJK Regional 9 Kalimantan menerima 29 pengaduan dari masyarakat
- Rinciannya, 14 pengaduan di sektor perbankan dan 15 pengaduan berkaitan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

(IKNB). Seluruh pengaduan telah selesai ditangani oleh lembaga jasa keuangan terkait," bebernya.

Sedangkan terkait pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama Satgas Waspada Investasi Daerah Kalimantan Selatan (SWID Kalsel) melakukan penanganan dan menghentikan dua penawaran jasa keuangan ilegal dan satu

travel umrah ilegal.

"Jasa keuangan ilegal tersebut menawarkan asuransi jiwa kepada satu perguruan tinggi dan penawaran jasa pegadaian tanpa izin di Kota Banjarmasin," ujar Darmansyah yang baru menjabat sekitar tiga bulan.

Dia melanjutkan, OJK juga telah menyelenggarakan kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) 2023 di Banjarmasin, berkolaborasi dengan penyelenggara Financial Technology (Fintech) serta Asosiasi di bidang Fintech. Tujuannya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berkelanjutan mengenai produk dan layanan jasa keuangan digital, serta tips dalam memitigasi risiko terkait teknologi. "Acara tersebut berhasil menarik minat lebih dari 400 mahasiswa Kalimantan Selatan," pungkas Darmansyah yang mantan Direktur Humas OJK RI. (da)

Judul	Kolaborasi Hadirkan Layanan Kesehatan Terbaik dari Korea
Nama Media	suara.com
Newstrend	Asuransi Hanwha Life dan K-Lab
Halaman/URL	https://www.suara.com/bisnis/2023/07/11/100000/kolaborasi-hadirkan-layanan-kesehatan-terbaik-dari-korea
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

Kolaborasi Hadirkan Layanan Kesehatan Terbaik dari Korea

Iman Firmansyah

Selasa, 11 Juli 2023 | 10:00 WIB



Klinik gaya Korea terbaik dengan fasilitas dan peralatan medis terbaru dipadukan dengan desain interior modern di K-Lab Medical Center. (Dok: Hanwha Life)

Suara.com - Hanwha Life perusahaan asuransi jiwa di Korea Selatan kini menggandeng K-Lab untuk memberikan akses layanan **kesehatan** No.1 dari Korea Selatan. CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong bersama Direktur LX International Choi Min menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama Hanwha Life dan K-Lab di K-Lab Medical Center, Jakarta Pusat, 7 Juni 2023 lalu.

K-Lab Medical Center adalah **klinik** pemeriksaan kesehatan bernuansa Korea pertama di Indonesia. K-Lab merupakan hasil kolaborasi dari Seoul Clinical Laboratories (SCL) yang ternama sebagai klinik laboratorium pertama dan terbaik di Korea, bersama LX International (sebelumnya LG International) yang telah beroperasi lebih dari setengah abad di Indonesia. Lebih lanjut, K-Lab juga didukung oleh Hanaro Medical Foundation, institusi

Judul	Komisi III DPRD Medan Rekomendasikan PT Prudential Life Insurance Bayar Klaim Nasabah
Nama Media	jurnalx.co.id
Newstrend	DPRD Desak Asuransi Prudential Bayar Klaim Nasabah
Halaman/URL	https://jurnalx.co.id/komisi-iii-dprd-medan-rekomendasikan-pt-prudential-life-insurance-bayar-klaim-nasabah/
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Negative

Komisi III DPRD Medan Rekomendasikan PT Prudential Life Insurance Bayar Klaim Nasabah

 by Jurnalx.co.id — 11/07/2023 in BERITA, Medan AA



Komisi III DPRD Medan gelar rapat dengar pendapat dengan PT Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia) terkait klaim nasabahan yang tak dibayar. (Foto Romulo)

26 **68**
SHARES VIEWS



Bagikan ke Facebook



Bagikan ke Whatsapp



Bagikan ke Telegram



Bagikan ke Email



MEDAN

Komisi III DPRD Medan rekomendasikan agar pihak PT Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia) segera membayar klaim asuransi kematian terhadap 3 ahli waris. Sebab, ke 3 nama tertanggung dianggap sudah memenuhi syarat dengan bukti memiliki polis.

» Populer Hari Ini

BERITA

Polda Sumut di Demo, Massa : Geng Motor Telah Membuat Citra Kota Medan Buruk

🕒 JULI 11, 2023

NARKOBA

Sat Narkoba Polres Siantar Ringkus Empat Pria Diduga Pengekar Shabu di Simarimbun

🕒 JUNI 29, 2023

BERITA

Komisi III DPRD Medan Rekomendasikan PT Prudential Life Insurance Bayar Klaim Nasabah

🕒 JULI 11, 2023

Judul	OJK Terus Pantau Penyelesaian Kewajiban Kresna Life terhadap Pemegang Polis
Nama Media	bisnis.com
Newstrend	PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life)
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20230711/215/1673749/ojk-terus-pantau-penyelesaian-kewajiban-kresna-life-terhadap-pemegang-polis
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

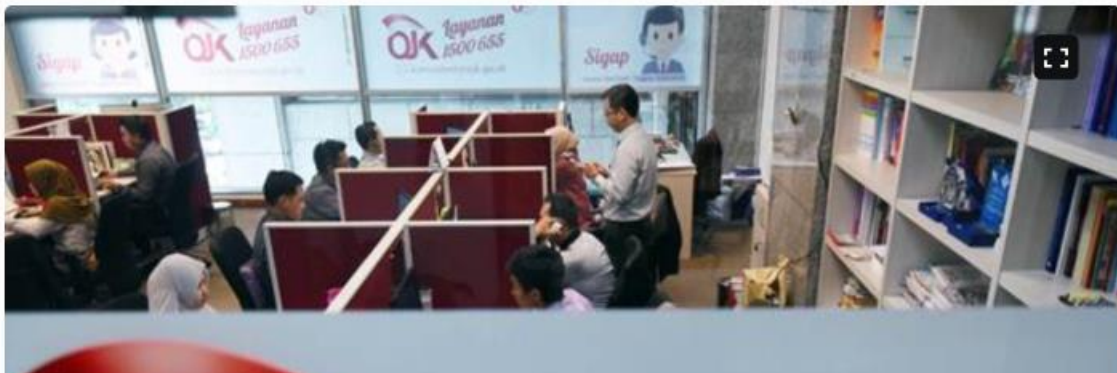
OJK Terus Pantau Penyelesaian Kewajiban Kresna Life terhadap Pemegang Polis

Usai pencabutan izin usaha, OJK terus memantau penyelesaian kewajiban Kresna Life kepada para pemegang polis.



Pernita Hestin Untari - Bisnis.com

11 Juli 2023 | 14:25 WIB



Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) terus memonitoring penyelesaian masalah di industri **asuransi**, termasuk terkait dengan pencabutan izin usaha PT **Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life)**.

"OJK terus memantau penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian," tulis OJK dalam Laporan OJK Dorong Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan Secara Masif pada Selasa (11/7/2023).

Pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Kresna Life lantaran perusahaan asuransi jiwa itu sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus *risk-based capital* (RBC) tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Judul	Hati-hati Penipuan Asuransi, Ini Tips Beli Lewat Agen dan Online
Nama Media	jateng.metrotvnews.com
Newstrend	Sosialisasi tentang Asuransi
Halaman/URL	https://jateng.metrotvnews.com/play/NP6CZqGw-hati-hati-penipuan-asuransi-ini-tips-beli-lewat-agen-dan-online
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive



Hati-hati Penipuan Asuransi, Ini Tips Beli Lewat Agen dan *Online*

Annisa ayu artanti • 11 July 2023 14:54

SHARE NOW



Jakarta: Asuransi merupakan kata yang tidak asing didengar. Sebagai proteksi terhadap berbagai risiko di kemudian hari, asuransi menjadi produk penting untuk dimiliki.

Sayangnya, masih banyak konotasi negatif yang melekat dalam asuransi. Apalagi jika mendengar kata agen atau pemasar asuransi, banyak masyarakat antipati dan menghindarinya.

Sebagai pemula yang ingin memiliki produk asuransi, mungkin kesulitan memutuskan membeli asuransi di mana. Selain itu, jika Anda juga merasa takut menjadi korban penipuan asuransi.

Judul	OJK Giatkan Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan hingga ke Perdesaan
Nama Media	bisnis.com
Newstrend	Program literasi dan inklusi keuangan OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20230711/90/1673750/ojk-giatkan-pemerataan-literasi-dan-inklusi-keuangan-hingga-ke-perdesaan
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

OJK Giatkan Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan hingga ke Perdesaan

OJK terus mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui sejumlah program.



Purnita Hestin Untari - Bisnis.com

11 Juli 2023 | 15:08 WIB



Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) terus mendorong pemerataan **literasi** dan **inklusi keuangan** kepada masyarakat. Hal tersebut penting karena maraknya penipuan keuangan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Selain itu, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam Laporan OJK Dorong Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan Secara Masif yang dirilis Selasa (11/7/2023), tercatat ada beberapa program yang telah dijalankan untuk mendukung pemerataan tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Edukasi Keuangan, Learning Management System (LMSKU), Sikapi Uangmu, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Judul	MNC Life Gandeng BPR Dinar Pusaka, Luncurkan Layanan Asuransi Jiwa Kredit
Nama Media	idxchannel.com
Newstrend	MNC Life Kerja Sama dengan BPR Dinar Pusaka
Halaman/URL	https://www.idxchannel.com/banking/mnc-life-gandeng-bpr-dinar-pusaka-luncurkan-layanan-asuransi-jiwa-kredit
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

MNC Life Gandeng BPR Dinar Pusaka, Luncurkan Layanan Asuransi Jiwa Kredit

Banking | Febrina Ratna | 11/07/2023 15:23 WIB

MNC Life menjalin kerja sama dengan BPR Dinar Pusaka untuk melengkapi layanan kepada nasabah, yaitu menyediakan asuransi jiwa kredit.



IDXChannel - PT **MNC Life** Assurance (MNC Life), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, menandatangani MoU dengan **BPR Dinar Pusaka**.

Penandatanganan MoU dilakukan di Head Office BPR Dinar Pusaka hari ini, Selasa (11/07/2023). Head of Partnership PT MNC Life Assurance Eko Suandi mengatakan, "MNC Life berharap kerja sama ini nantinya dapat menambah daya saing MNC Life di market."

Judul	Prudential Indonesia Perkuat Cyber Resilience Culture
Nama Media	medanheadlines.com
Newstrend	Cyber Resilience Culture Perkuat Prudential Indonesia
Halaman/URL	https://medanheadlines.com/2023/07/11/prudential-indonesia-perkuat-cyber-resilience-culture/
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

Prudential Indonesia Perkuat Cyber Resilience Culture



Adminmh
11/07/2023



[MEDANHEADLINES.COM](https://medanheadlines.com) - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkomitmen untuk melindungi nasabah dengan terus meningkatkan upaya inovasi dan layanan, yang termasuk juga melindungi data nasabah melalui Cyber Resilience Culture. Hal ini disampaikan dalam penyelenggaraan *Risk Awareness Series 2023* yang berlangsung pada 7 Juli 2023.

Judul	BNI Life Jabarkan Untung Rugi Merger dan Akuisisi
Nama Media	kontan.co.id
Newstrend	Permodalan PT BNI Life Insurance
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-life-jabarkan-untung-rugi-merger-dan-akuisisi
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

BNI Life Jabarkan Untung Rugi Merger dan Akuisisi

Selasa, 11 Juli 2023 / 20:54 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Life Insurance memiliki permodalan (ekuitas) yang cukup baik, sehingga sampai saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi merger maupun akuisisi.

Chief Financial Officer PT BNI Life Insurance Eben Eser Nainggolan mengatakan, pihaknya memiliki kecukupan modal yang baik didukung oleh dua pemegang saham besar yakni BNI dan Sumitomo Life serta memiliki tingkat risk based capital (RBC) yang bagus.

Menilik laporan keuangan per Mei 2023, ekuitas BNI Life tercatat sebesar Rp 6,06 triliun, naik 11,39% secara tahunan dibandingkan Mei 2022 yang sebesar Rp 5,44 triliun.

Judul	Generasi Indonesia Nilai Merger dan Akuisisi Bisa Mendorong Pertumbuhan
Nama Media	id.tradingview.com
Newstrend	Merger dan Akuisisi Bisa Mendorong Pertumbuhan
Halaman/URL	https://id.tradingview.com/news/kontan:ef754dea987ea:0/
Tanggal Berita	2023-07-11
Sentimen	Positive

Kontan.co.id

Generasi Indonesia Nilai Merger dan Akuisisi Bisa Mendorong Pertumbuhan

11 Jul 2023 · 21.40 GMT+7



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menilai aksi merger dan akuisisi merupakan hal yang lumrah terjadi di industri untuk memperluas pasar dan meningkatkan ukuran perusahaan.

Chief Marketing Officer Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama menjelaskan bahwa merger atau akuisisi memang bisa mendorong pertumbuhan, karena adanya kolaborasi modal, sumber daya dan infrastruktur di dalamnya.

“Hingga saat ini kami belum berencana untuk melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan asuransi lain,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (10/7).

Judul	Wamen BUMN Buka-bukaan soal Nasib Aset Sitaan Jiwasraya
Nama Media	postfed.online
Newstrend	Kejagung Sita Aset Tanah, Saham dan Uang dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat IFG Life Rilis IFG LifeSAVER
Halaman/URL	https://postfed.online/2023/07/11/wamen-bumn-buka-bukaan-soal-nasib-aset-sitaan-jiwasraya/
Tanggal Berita	2023-07-12
Sentimen	Positive

Wamen BUMN Buka-bukaan soal Nasib Aset Sitaan Jiwasraya

By Rania Thomson July 11, 2023

11 0



Wamen II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta

Beberapa waktu lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima aset sitaan negara dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) senilai Rp 3,1 triliun, salah satunya saham. Hal ini menandakan, pengelolaannya resmi berada di tangan Kementerian BUMN.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan seluruh aset sitaan tersebut nantinya akan dijual untuk disalurkan sebagai modal IFG Life. Sejalan dengan itu, akan dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai penyaluran ini.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk nyusun PP jadi seluruh perampasan yang sudah di-cash kan itu secara bertahap akan dialihkan menjadi modal dasar di IFG Life," kata Tiko, saat ditemui di Travoy Hub/Toll Corridor Development Taman Mini Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2023).

Judul	Launch of the OECD Employment Outlook 2023 – Tuesday 11 July - Register now for online press conference
Nama Media	oecd.org
Newstrend	Launch of the OECD Employment
Halaman/URL	https://www.oecd.org/newsroom/launch-of-the-oecd-employment-outlook-2023tuesday-11-july-register-now-for-online-press-conference.htm
Tanggal Berita	2023-07-04
Sentimen	Positive

Launch of the OECD Employment Outlook 2023 – Tuesday 11 July - Register now for online press conference

04/07/2023 - The OECD will release its annual Employment Outlook report on Tuesday 11 July at 11:00 CEST/09:00 GMT. The report presents the latest data and analysis of the employment situation in OECD countries, including the impact of the cost-of-living crisis on wages and recommendations for what governments can do to support workers and households. This year's edition has a focus on the impact of Artificial Intelligence on the labour market, including the findings of the first cross-country survey on the impact of AI.

OECD Secretary-General Mathias Cormann will present the report's key messages and take questions at a press conference with **OECD Director of Employment, Labour and Social Affairs Stefano Scarpetta** starting at 11:00 CEST/09:00 GMT on Tuesday 11 July. The event will take place in English, with French interpretation, and will be open to press. [Register to attend the press conference in person.](#)

Journalists unable to attend can [register in advance to participate in the press conference via Zoom](#). Once registered, you will receive an email with a Zoom link to connect.

The presentation will also be [webcast live, without registration](#).

Journalists registering for the event will receive the report under embargo prior to release. Additional requests for the report under embargo should be sent by e-mail to embargo@oecd.org. Embargoed copies of the report will be sent out the day before the launch.

Journalists requesting an electronic version in advance of the release time agree to respect OECD embargo conditions.

Judul	Global cyber loss event estimated at \$33bn
Nama Media	asiainsurancereview.com
Newstrend	Cyber event has the potential to produce damages
Halaman/URL	https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/85013/Type/AirPlus/Global-cyber-loss-event-estimated-at-33bn
Tanggal Berita	2023-07-04
Sentimen	Negative

Global cyber loss event estimated at \$33bn



By Anoop Khanna | 04 Jul 2023



Global Cyber

Other News

New emerging risks

Cyber attacks driven by software vulnerabilities

Economic and cyber risks biggest concern for directors

Trillion-dollar global protection gaps identified

Global debt of \$22tn at risk of cyber attacks

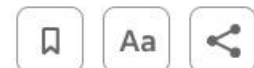
A one-in-200-year cyber event has the potential to produce damages between \$15.6bn and \$33.4bn and a one-in-50-year event could lead to potential damages in the range of \$5.5bn-\$24.4bn according to a new report by Guy Carpenter.

Judul	Beijing jabs in US-China tech fight with chip material export curbs
Nama Media	reuters.com
Newstrend	Companies caught out by China's
Halaman/URL	https://www.reuters.com/technology/us-firm-axt-applying-permits-after-china-restricts-chipmaking-exports-2023-07-04/
Tanggal Berita	2023-07-05
Sentimen	Negative

Beijing jabs in US-China tech fight with chip material export curbs

By Amy Lv and Brenda Goh

July 5, 2023 8:40 AM GMT+7 · Updated 7 days ago



Judul	The Insurance Commission of The Bahamas joins IAIS cooperation and information exchange agreement
Nama Media	iaisweb.org
Newstrend	International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)
Halaman/URL	https://www.iaisweb.org/2023/07/the-insurance-commission-of-the-bahamas-joins-iais-cooperation-and-information-exchange-agreement/
Tanggal Berita	2023-07-05
Sentimen	Positive

The Insurance Commission of The Bahamas joins IAIS cooperation and information exchange agreement

5 Jul 2023 | in Latest news, MMoU, Press releases

Basel, Switzerland / Nassau NP, The Bahamas – The Insurance Commission of The Bahamas has become a member of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) – an international supervisory cooperation and information exchange agreement.

“We are pleased to welcome The Bahamas as a signatory to the MMoU,” said Vicky Saporta, Chair of the IAIS Executive Committee. “As we have experienced over the past years of social and economic challenges, there are enormous benefits to the global insurance sector when supervisors are able to cooperate quickly and effectively across jurisdictions. The MMoU is an essential regulatory tool for supervisors to foster safer and more stable insurance markets.”

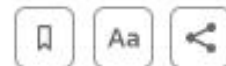
“I am pleased that the Insurance Commission of The Bahamas has become a signatory to the IAIS MMoU,” stated Michele Fields, Superintendent of Insurance. “This agreement strengthens our ability to work cooperatively with other international supervisors – cooperation that is critically important to promoting effective supervision and protecting the consumers in The Bahamas.”

Judul	UN climate alliance scraps emissions rules for insurers after exodus
Nama Media	reuters.com
Newstrend	The sun sets over the capital's skyline as warm temperatures
Halaman/URL	https://www.reuters.com/sustainability/un-climate-alliance-scraps-emissions-rules-insurers-2023-07-05/
Tanggal Berita	2023-07-06
Sentimen	Positive

UN climate alliance scraps emissions rules for insurers after exodus

By Tommy Wilkes

July 6, 2023 10:45 PM GMT+7 - Updated 5 days ago



The sun sets over the capital's skyline as warm temperatures, wind and emissions combined to trigger a 'high' alert for air pollution, in London, Britain, June 13, 2023. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

LONDON, July 5 (Reuters) - The Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) has ditched all requirements for members to set or publish greenhouse gas emission-reduction targets, the U.N. said on Wednesday, a major rewrite of its rules after U.S. political pressure led to a member exodus.

The NZIA is one of several United Nations-backed alliances that are supposed to coalesce financial institutions to drive efforts towards reaching net zero carbon emissions by 2050.

Judul	WTW revolutionizes property broking by including climate data analytics on property portfolios
Nama Media	wtwco.com
Newstrend	Property broking needs to include climate data to be fully relevant says WTW
Halaman/URL	https://www.wtwco.com/en-us/news/2023/07/wtw-revolutionizes-property-broking-by-including-climate-data-analytics-on-property-portfolios
Tanggal Berita	2023-07-10
Sentimen	Positive

WTW revolutionizes property broking by including climate data analytics on property portfolios

July 10, 2023

Property broking needs to include climate data to be fully relevant says WTW

ARLINGTON, 10, July 2023 – Changing the property renewals and property propositions to include climate data is essential to optimizing clients' risk portfolios says WTW, a leading global advisory, broking, and solutions company (NASDAQ:WTW).

WTW has incorporated climate data into its broking property renewals to help clients understand their long-term risks relating to their property portfolio. The data enables the assessment of future exposures to climate change by evaluating a series of climate indicators which helps companies to optimize their risk management strategies.